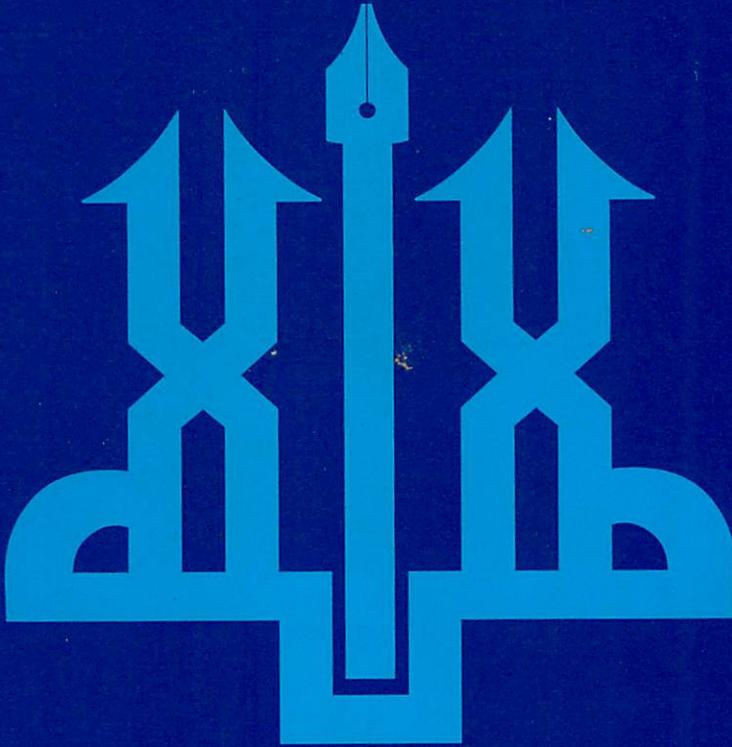


Vol. V, No. 2 Agustus 2003

ISSN 1411-1373

# QUALITA AHSANA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN



Moh. Achjar, Dja'far Mawardi, Moh. Soleh,  
Achmad Zaini, Ali Mudlofir, Agus Aditoni

Diterbitkan Oleh :  
Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel

# Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

TERAKREDITASI BERDASARKAN SK DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS  
NO. 52/DIKTI/KEP/2002 Tanggal: 12 Nopember 2002

**Pemimpin Redaksi:**

*H. A. Saiful Anam*

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

*Saiful Jazil*

**Sekretaris Redaksi:**

*H. Fachrur Rozie Hasy  
Syaikhul Amin*

**Penyunting Ahli:**

*H. Amin Abdullah  
H. Suroso Imam Zadjuli  
Sunarto  
Muh. Nuh  
H. Arief Furqon  
H. Syafiq A. Mughni*

**Penyunting Pelaksana:**

*Masdar Hilmy  
Biyanto  
Achmad Zaini  
Nur Kholis  
Jeje Abdul Rozak  
Amiq  
Bambang Subandi*

**Sekretaris:**

*Imam Syafi'i  
M. Saeful Bahar  
Moh. Yazid  
Samsul Bahari  
Sahuri  
Imampuri*

**QUALITA AHSANA** diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel  
Surabaya tiga kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember  
dengan Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai pelindung

**Alamat Penerbit/Redaksi:**

*Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel  
Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237  
Telp. (031) 8410298 ps. 34 Fax. (031) 8413300  
E-Mail: [sunanampel@surabaya.wasantara.net.id](mailto:sunanampel@surabaya.wasantara.net.id)  
Homepage: <http://www.geocities.com/HotSprings/6774>*

# **Qualita Ahsana**

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman

---

## **DAFTAR ISI**

**PERBEDAAN TINGKAT RELIGIUSITAS MAHASISWA IAIN SUNAN  
AMPEL SURABAYA DITINJAU DARI LATAR BELAKANG  
PENDIDIKAN, TEMPAT TINGGAL DAN JENIS KELAMIN**

*Moh. Achjar (112)*

**ALI AHMAD BAKTSIR  
SASTRAWAN ARAB INDONESIA**

*Dja'far Mawardi (127)*

**PENGARUH PSIKOTERAPI ISLAMI TERHADAP PENURUNAN  
STRES PADA REMAJA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI  
PESANTREN INABAH XIX SURYALAYA SURABAYA**

*Moh. Sholeh (142)*

**PERAN DAN FUNGSI DOSEN WALI STUDI  
DI IAIN SUNAN AMPEL**

*Achmad Zaini (164 )*

**MAX WEBER: ETIKA ROTESTAN DAN SEMANGAT KAPITALISME  
(ANALISIS KOMPARATIF DENGAN ISLAM)**

*Ali Mudlofir (179)*

**PEMIKIRAN TEOLOGI ABŪ HANĪFAH**

*Agus Aditoni (199)*

# PERAN DAN FUNGSI DOSEN WALI STUDI DI IAIN SUNAN AMPEL

*Achmad Zaini*<sup>1</sup>

**Abstract:** This research tries to find out the role and function of academic advisors at the Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. It is based on the prevailing assumption among students that advising process has not run as expected. Academic advisors are appointed only to sign the study programming cards. Using qualitative paradigm, the researcher comes to a conclusion that advising process at IAIN Sunan Ampel has been relatively far from ideal. This ineffectiveness is caused not only by inoptimal effort of the academic advisors in carrying out their role and function, but also by inconducive system for the advising program. Improvement, however, should always be made so that the role and function of the academic advisors can run as prescribed in the academic guidelines of IAIN Sunan Ampel.

**Kata Kunci:** Dosen wali studi, IAIN Sunan Ampel, kartu rencana studi, indeks prestasi

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

## I

**A. Latar Belakang**

Hasil penelitian A. Kadir<sup>2</sup> tentang "Intensitas Minat Baca Mahasiswa IAIN Sunan Ampel" menggambarkan betapa rendahnya intensitas membaca mahasiswa. Dari data yang diperoleh ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, bahwa tidak semua mahasiswa membaca buku tiap hari, atau diperoleh data bahwa frekwensi baca mahasiswa adalah 5,625 kali per minggu (6 hari). Dengan kata lain bahwa frekwensi maupun lama membaca mahasiswa setiap minggunya belum sepadan dengan tugas-tugas yang semestinya dilakukan. *Kedua*, mahasiswa hanya menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 52,14 menit perhari pada hari baca atau sepadan dengan 10 halaman per harinya. Kondisi ini diperburuk dengan sebuah realitas bahwa mahasiswa hanya bisa menyerap sekitar 4 halaman saja dari 10 halaman yang dibacanya setiap harinya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa membaca buku wajib dan anjuran hanya mencapai target 59,75% dari jumlah mata kuliah yang diprogram mahasiswa.

Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan mengingat struktur pembelajaran di perguruan tinggi berbanding antara 29,4% berupa kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, dengan 70,6% berupa kegiatan mahasiswa baik belajar mandiri maupun melaksanakan tugas mandiri dan tugas terstruktur dari dosen pengampu mata kuliah tertentu.

Pola belajar mengajar sebagaimana tersebut di atas mengandung konsekwensi bahwa mahasiswa dituntut lebih aktif mencari informasi dan membaca buku sebagai bahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen pengampunya. Di sinilah sebenarnya mahasiswa dituntut untuk tidak puas dan hanya menyandarkan pada materi yang disampaikan oleh dosen mata kuliah tertentu, melainkan dituntut secara aktif dan mandiri untuk menggeluti buku-buku bacaan, utamanya buku wajib dan referensi tambahan dari mata kuliah yang diprogramnya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah sistem yang digunakan selama ini di IAIN Sunan Ampel adalah sitem paket bukan sistem kredit semester (SKS) murni. Hal ini, di satu sisi, tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah apa dan berapa kredit yang akan diambilnya dalam satu semester. Di sisi yang lain, seorang

---

<sup>2</sup> A. Kadir, "Intensitas Minat Baca Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel," Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan, 1998.

dosen wali studi juga tidak mempunyai peran yang berarti dalam memberikan *advice* akademik berkaitan dengan pengambilan mata kuliah disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa datang ke dosen wali studinya hanya meminta tanda tangan untuk keperluan pengisian buku rencana studinya.

Persoalan lain yang muncul adalah belum “pahaminya” dosen wali studi akan tugas dan fungsinya. Meskipun IAIN sudah membuat panduan<sup>3</sup>, namun panduan itu hanya sebatas panduan tanpa ada perangkat pendukungnya, dan setiap dosen baru yang ditunjuk untuk menjadi dosen wali studi juga tidak pernah dibekali “ilmu” tentang perwalian dan seluk beluknya. Mahasiswa pun juga demikian. Meskipun mereka diberi buku panduan, nampaknya mereka juga tidak tahu secara pasti tentang proses perwalian, apa yang harus dilakukan, apa tugas dan tanggung jawabnya. Yang terjadi kemudian adalah mereka mengikuti tradisi yang ada, yaitu datang meminta tanda tangan dosen wali studinya.

Hal inilah yang terjadi sampai saat ini. Padahal mengacu pada buku panduan yang dibuat oleh pihak rektorat, walaupun masih cukup global, ada beberapa hal yang sangat signifikan keberadaan dosen wali studi. Dunia kampus dengan kebebasan berpikir dan berpendapat (kebebasan mimbar) sangat berbeda dibandingkan tingkat pendidikan di bawahnya, SLTA atau bahkan SLTP. Berpikir kritis dan ilmiah dituntut bagi mahasiswa sehingga kampus sebagai wadah *agent of change* bukanlah menara gading, tetapi mempunyai tugas dalam tiga hal sebagaimana termaktub dalam tri dharma perguruan tinggi, yakni pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tuntutan sebagaimana di atas, perwalian mempunyai arti yang signifikan, khususnya bagi mahasiswa. Adanya perwalian paling tidak akan menolong mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berpikir sesuai dengan kehidupan kampus. Di samping itu, model pembelajaran, khususnya tatap muka dan penugasan yang berbeda dengan level pendidikan sebelumnya, perwalian juga berperan dalam membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar di perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan waktu dan lingkungan kampus secara efektif dan efisien, sekaligus kesulitan dan hambatan yang

---

<sup>3</sup> Tugas dosen wali studi dapat dilihat di Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Dua (D2) dan Strata Satu (S1) yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel tahun 2002, hal 72

dihadapi dalam masa studinya sedikit banyak dapat dibantu oleh dosen wali studinya melalui konsultasi.

Proses perwalian sebagaimana diungkapkan di atas menarik penulis untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya tugas dan fungsi dosen wali, kendala dan hambatan apa yang dihadapi baik oleh dosen wali studi maupun oleh para mahasiswa ketika melakukan proses perwalian.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perwalian yang dilakukan oleh dosen wali studi terhadap mahasiswa di IAIN Sunan Ampel?
2. Peran dan fungsi apakah yang dilaksanakan oleh dosen wali studi dalam melaksanakan perwalian?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan kata lain, penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data deskriptif yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Jadi, penelitian ini melaporkan, mendeskripsikan dan menganalisis masalah tentang peran dosen wali studi dalam meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa di IAIN Sunan Ampel.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan fenomenologis yang maksudnya peneliti berusaha memahami arti peristiwa-peristiwa dan kegiatannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Model paradigmanya adalah naturalistik, yakni penelitiannya dilaksanakan dalam konteks alami, tanpa isolasi atas obyek berdasarkan kehendak peneliti secara sepihak baik seluruhnya maupun sebagian saja daripadanya.

Obyek dari penelitian ini adalah seluruh dosen wali studi dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari dosen wali studi dan mahasiswa dari lima fakultas: Tarbiyah, Adab, Syari'ah, Dakwah dan Ushuluddin. Dari sekian banyak, akan kita tentukan sampelnya secara purposive dengan memegang prinsip, sebagaimana banyak dilakukan oleh para peneliti kualitatif, *snowball*, sehingga hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim sehingga hal-hal yang dicari tampil menonjol sehingga lebih mudah dicari maknanya. Dalam kaitan dengan pengambilan sampel secara purposive, peneliti sudah pada awal penelitian

menentukan beberapa orang yang dipandang mempunyai informasi yang cukup berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya para dekan, pembantu dekan I, ketua jurusan atau sekretaris jurusan dan beberapa dosen wali studi yang dipandang cukup memahami persoalan tentang dosen wali studi. Sebagian mahasiswa juga kita ambil sebagai sampel sebagai bahan masukan untuk mengetahui peran yang dimainkan oleh dosen wali studi khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai dosen wali studi. Adapun data, sumber data dan IPD sebagai berikut:

No.	Jenis Data	Obyek	Teknik
1.	Data-data IAIN	Dokumen	Dokumentasi
2.	Kondisi IAIN	Fakultas	Observasi
3.	Tugas dan Fungsi Dosen Wali Studi	Dosen Mahasiswa	1. Angket 2. <i>depth interview</i>
4.	Sistem perwalian	Birokrat	<i>Depth Interview</i>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah itu penulis menggunakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang diikuti penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian penulis kategorisasikan dengan memberi kode-kode tertentu yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapat dan lain sebagainya dan proses ini diakhiri dengan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya, penulis akan melanjutkan dengan tahapan pencarian makna/tafsiran data sebab data terkumpul bukanlah sampah yang dikumpulkan dan bukan tujuan utama dari penelitian, melainkan alat untuk memperjelas pikiran dan mencari kesimpulan induktif.

## II

### A. Pendapat Para Birokrat dan Dosen Wali Studi

Satu persoalan yang cukup relevan untuk didiskusikan di IAIN Sunan Ampel adalah menyangkut keberadaan dosen wali. Bukan hanya sekedar persoalan eksistensi dari dosen wali, tapi yang lebih penting adalah tentang fungsi substansional dari keberadaan dosen wali ini. Dari sekian banyak persoalan yang terjadi baik dalam aktifitas mahasiswa maupun yang berkaitan dengan persoalan dalam studinya berikut dampak terhadap

prestasinya penyebabnya antara lain karena mahasiswa merasa tidak memiliki tempat untuk mengadukan segala persoalan yang menimpanya. Kondisi sebagaimana terdekripsikan di atas merupakan cerminan dari kurang berfungsinya peranan dan fungsi dari keberadaan dosen wali.

Dalam hal penentuan dosen wali studi, Abdul Salam, Dekan Fakultas Syari'ah, menyatakan bahwa perwalian yang terjadi di IAIN Sunan Ampel khususnya di Syari'ah dilakukan dengan jalan penunjukan, dalam artian setiap dosen akan terbagi rata dengan keberadaan mahasiswanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan terhadap salah seorang dosen, karena banyak mahasiswa yang merasa cocok dengannya, tentu, bila hal ini yang terjadi akan mengakibatkan sedikit ketidakadilan." Hal yang senada juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah, Ali Aziz. Dia mengatakan bahwa sistem penunjukan dalam pemilahan dan pembagian perwalian yang terjadi selama ini adalah jalan yang terbaik untuk mengurangi kemungkinan ketimpangan. Dengan cara seperti itu, menurutnya, kita akan terhindar dari berbondong-bondongnya mahasiswa memilih dosen-dosen yang baik di mata mereka. Proses penentuan sebagaimana di atas, menurut Pembantu Dekan I Syari'ah, merupakan sesuai dengan aturan yang diintruksikan dari institut, jadi model perwalian ini sudah cukup baik, karena dengan begini –pola ini- setiap dosen akan diposisikan sama dan memiliki tanggung jawab yang sama di depan mahasiswa.

Ketika ditanya tentang lamanya tanggung jawab yang diembankan pada dosen wali untuk membina mahasiswa perwaliannya, ketiga narasumber sepakat bahwa waktu yang diembankan adalah selamanya. Artinya, waktu perwalian tidak terbatas dengan batasan aturan yang temporal tapi berlaku selama mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa atau pada waktu yang lain dosen yang bersangkutan telah pensiun atau telah berhalangan tetap (mati).

Dengan batas waktu yang tak terbatas dan tidak dimungkinkannya pemindahan perwalian dari seorang dosen ke dosen yang lain, masalah yang kemungkinan muncul adalah jika ada kasus di mana terdapat ketidakcocokan antara seorang dosen dan mahasiswanya secara personal. Jika kasus ini yang terjadi, tentu, tanpa adanya kesempatan untuk pindah dan mengganti dosen pembimbing, akan menjadi batu sandungan sendiri bagi mahasiswa yang memang dari awal merasa tidak cocok dengan dosen walinya, atau ketika ada dosen wali yang memang tidak ada kecocokan dengan mahasiswanya. Ali Aziz, ketika ditanya dan diminta komentarnya

tentang kemungkinan terjadinya persoalan ini, dia berkomentar “dosen itu pada dasarnya harus dapat menciptakan hubungan seharmonis mungkin dengan mahasiswanya, makanya setiap dosen mempunyai tanggung jawab untuk dapat menciptakan *report*, artinya dia harus dapat melaporkan perkembangan prestasi dan kondisi setiap mahasiswanya, di lain pihak dia harus dapat menciptakan *raport*, yaitu nilai kedekatan dosen wali dengan mahasiswanya”. Tentu hal ini bukan hal yang mudah, sebab diperlukan sebuah langkah proaktif dari dosen. Dalam kaitan dengan hal ini, dia menekankan bahwa “dosen harus berani menjemput bola, mengalah untuk mendekat pada mahasiswanya, jangan gengsi untuk terlebih dahulu mendekat, panggillah mahasiswa, atau bahkan datang mereka untuk diajak bicara seputar persoalan mereka, dengan begitu pasti akan tercipta iklim yang harmonis dan kondusif”.

Dengan adanya interaksi yang harmonis dan kondusif akan tercipta sebuah komunikasi yang baik, sehingga transformasi keilmuan yang harus terjadi dapat berjalan dengan sempurna. Dakwatul Chairah, PD I Fak. Syari’ah, yakin bahwa “kedekatan dosen dengan mahasiswa akan sangat menunjang prestasi mahasiswa dan semangat mengajar dari dosen-dosen yang ada.”

Sebenarnya dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Dua (2) dan Strata Satu (1) IAIN Sunan Ampel yang diterbitkan oleh pihak Institut sudah begitu jelas tentang pengertian, tujuan dan tata tertib perwalian. Namun dari sekian banyak mahasiswa dan dosen, sebagaimana disinyalir oleh Abd. Salam, banyak yang belum paham dengan fungsi dan tujuan perwalian, sehingga kebanyakan mahasiswa tidak dapat mengambil manfaat dari perwalian ini.” Mereka menganggap perwalian ini hanya sebatas tanda tangan pada KRS setiap akan memulai semester baru. Seharusnya antara dosen wali dengan mahasiswa, sama-sama paham akan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing.”

Perwalian yang dalam aturan harus dilakukan dengan konsultasi periodik dan terjadwal, ternyata hanya dapat terjadi satu kali dalam satu semester, yaitu ketika pemrograman, itupun seringkali antara mahasiswa dan dosen tidak teralui dengan konsultasi, tapi hanya untuk menerima tanda tangannya. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Fakultas Syari’ah, bahkan mungkin di semua fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel. Dalam kaitan ini Ali Aziz menyatakan bahwa “makanya, saya sarankan, seharusnya dosen yang berani mendekat, kalau menunggu

mahasiswa, kapan? Mereka itu, bukan karena malas untuk ketemu dosennya, tapi kebanyakan dari mereka itu takut untuk bertemu dan konsultasi dengan dosennya.”

Ali Aziz, ketika ditanya tentang ketidaksempurnaan sistem dan praktek perwalian, dan menyinggung tentang kemungkinan penyebabnya adalah karena honor yang kecil, dia mengelak dan mengatakan ”tidak, bukan karena honor, memang honor nya kecil, tapi bukan itu. Tapi, saya kira karena kesibukan dosen di luar, itu saja. Oh ya, ada satu hal yang juga penting untuk diingat, bahwa ketidakefektifan perwalian ini juga karena ketidakanggapan beberapa orang dosen untuk dapat berkomunikasi dengan baik pada mahasiswanya, coba lihat, berapa orang sih, dosen yang mempunyai *human relation* yang bagus ?”

Frekwensi pertemuan dosen wali dengan mahasiswanya yang sangat jarang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perwalian, yaitu, terbantunya mahasiswa dalam beradaptasi dan memahami iklim akademis di kampus, ujung-ujungnya, mahasiswa tidak akan dapat berakselarasi dengan arah progresifitas yang positif. Kegagalan hubungan harmonis yang seharusnya terjalin, murni adalah karena tidak ada pertemuan yang tetap antara mahasiswa dan dosen.

Ketidakteraturan pertemuan antara mahasiswa dan dosen bukan karena tidak ada bukti –semacam kartu khusus konsultasi- yang diterapkan. “Kartu seperti tanda bukti itu ada, bahkan kartu itu harus ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan” Kata Abd. Salam. “Namun untuk mempermudah mahasiswa, jika dosen yang bersangkutan tidak hadir, akan ada penggantinya yang siap untuk memberi stempel pada kartu yang dibawa mahasiswa. Kita telah menunjuk dua orang petugas akademik yang siap untuk memberi stempel itu, tapi ketidakhadiran dosen akan tetap tertulis di kartu itu.” Aturan ini, sengaja dibuat sebagai langkah kompromi apabila dosen yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Sehingga pihak dekanat Syari’ah berinisiatif untuk mempermudah mahasiswa dalam memprogram dengan jalan menggantikan kehadiran dosen dengan stempel dari pihak akademik.

Kasus di Fakultas Dakwah, aturan-aturan yang diterapkan selalu mendahulukan hubungan persuasif, maka dalam urusan administrasipun, Fakultas Dakwah sangat memberi kelonggaran bagi mahasiswanya. Terbukti, banyak sekali mahasiswa yang ketika memprogram studinya terlambat, dan dengan alasan-alasan tertentu dapat dengan mudah mengurusnya untuk dapat mengikuti kuliah. Ini, sangat berbeda dengan

Fak. Syari'ah. Kalau keterlambatan pemrograman mahasiswa terjadi karena memang kelalaian mahasiswa dan alasan yang diberikan tidak dapat diterima, maka, meskipun mereka sudah membayar SPP, mereka akan divonis tidak memprogram dan dianggap cuti dalam semester itu.“ Saat ini, hanya ada 10 orang yang terlambat memprogram, dan itupun karena mereka sakit. Tapi, kita juga memberi sanksi yang tegas jika keterlambatan itu karena memang kelengahan mereka. Saat ini ada mahasiswa yang sudah bayar SPP, tapi karena terlambat memprogram dan itu murni karena kelengahan mereka, maka dengan tegas kami langsung memberi sanksi, yaitu mereka dianggap cuti”. Pemberlakuan aturan ini ternyata selama ini tidak menimbulkan reaksi apapun dari mahasiswa, bahkan mereka dapat menerimanya.“

Ketika disinggung tentang evaluasi yang akan dilakukan untuk perbaikan sistem perwalian, ketiga narasumber, sepakat bahwa evaluasi penting dan harus dilakukan. “Kalau pada masa kepemimpinan kami, belum dapat dievaluasi, sebab aturan ini baru diberlakukan” ungkap Abd. Salam. “Tapi kalau melihat sistem pemrograman kuliah yang kita lakukan sekarang, sangat nampak bahwa cara seperti yang kita lakukan sekarang sangat efektif. Coba bandingkan dengan aturan yang terdahulu, lebih 100 orang yang terlambat atau memalsu tanda tangan dosen, berbeda sekali dengan sekarang yang hanya sepuluh orang itu.”

Berkaitan dengan evaluasi, Ali Azizpun menyatakan bahwa “kita juga sering malakukan evaluasi, tapi itu sebatas personal, kita sangat hati-hati dalam persoalan ini, kita lakukan dengan persuasif dan sehalus mungkin, sehingga para dosen tidak tersinggung dengan cara yang kita lakukan. Kita nggak mungkin sembarangan memberi sanksi, sebab karena memang tidak ada sanksi untuk hal ini, bahkan untuk memperingatkan para dosen, seringkali saya mengakalnya dengan metode yang tidak mudah mereka pahami bahwa metode ini adalah cara untuk memperingatkan mereka, contohnya, kita berikan kesempatan bagi dosen-dosen untuk memberikan ceramah singkat, dengan tema yang biasanya mereka langgar, seperti, korupsi waktu, atau kesabaran. Padahal, mereka itu sering tidak masuk dan kurang sabar dalam menghadapi mahasiswa.”

Dari ketiga narasumber dapatlah ditarik sebuah pemahaman, bahwa evaluasi yang dilakukan tidak mempunyai materi evaluasi yang khusus. Evaluasi yang dilakukapun tidak pernah dilakukan dalam sebuah forum khusus. Bukan persoalan bahwa perwalian ini sudah cukup baik, tapi alasan yang mendasari di dalamnya adalah kurangnya ada kejelasan

sangsi yang dapat diberikan bagi para dosen. Apalagi sampai mempengaruhi bahan penilaian dalam beban tugas sebagai tenaga edukatif.

Berbeda dengan beberapa narasumber awal, Prihananto, mempunyai pendapat lain tentang lemahnya aturan dan pelaksanaan perwalian di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi dia, permasalahan utama dalam perwalian ini terletak pada sistem-sistem yang berkaitan dengan persoalan perwalian ini. "Kelemahan ini, terutama sekali pada sistem perkuliahan kita, yang berubah dari sistem SKS murni menjadi sistem paket." Prihananto mengungkapkan bahwa dengan sistem paket seperti yang sekarang diterapkan, akan menutup kemungkinan berinteraksinya antara dosen dengan mahasiswa. Dengan sistem paket, sebagaimana sekarang, setiap mahasiswa akan dengan otomatis dapat mengikuti mata kuliah semester berikutnya, meskipun tanpa bimbingan dari dosen walinya. Artinya, pertimbangan dan pilihan mata kuliah yang akan ditempuh pada semester berikutnya tidak perlu lagi harus dikonsultasikan dengan dosen wali. Berbeda jika sistem SKS yang diterapkan. Setiap mahasiswa akan dengan sendirinya akan merasa butuh pada dosen walinya. Hal ini disebabkan, pertimbangan dan pilihan-pilihan mata kuliah yang kelak akan ditempuh, membutuhkan bimbingan dan pertimbangan dari para dosen wali. Tanpa disetujui oleh dosen wali, mahasiswa-mahasiswa tidak dapat memilih mata kuliah-kuliah pada semester berikutnya. Sebab, persetujuan dari dosen wali adalah sebuah prasyarat tersendiri yang harus dilewati oleh setiap mahasiswa.

Prihananto menyatakan secara terus terang bahwa "pemberlakuan sistem paket telah memperburuk kondisi perwalian kita, ya itu, sistem ini telah menjauhkan mahasiswa dengan dosennya". Meskipun demikian, dia tidak dengan begitu jelas menolak keberadaan sistem paket dalam perkuliahan, buktinya, dia mempersilahkan penerapan sistem paket, namun catatan yang diberikan olehnya, adalah sistem paket yang terkendali. Bagi Prihananto, mencari akar kesalahan dari perwalian dengan menunjuk salah satu oknum atau salah satu pihak, tentu sangat tidak bijak. Sebab baginya, kesalahan itu bukan hanya dilakukan oleh perorangan dari tiap individu, tapi kesalahan yang paling dominan adalah kesalahan sistem yang telah ada. Dia mengatakan bahwa: "Kita tidak didukung oleh lingkungan. Lingkungan kita masih mengajarkan kita untuk tidak belajar berinteraksi dengan baik, sehingga suasana belajar yang seharusnya harmonis dan kondusif tidak pernah tercipta."

Menyinggung tentang perwalian yang seringkali hanya disimbolkan dengan pembubuhan tanda tangan dosen wali dalam KRS mahasiswa, dijadikan target kritik sendiri oleh Prihananto. Menurutnya, "kita seharusnya bisa merubah *image* dosen wali sebagai sekedar penandatanganan dalam KRS mahasiswa.". Bahkan Prihananto memperkuat argumennya dengan menunjukkan pengertian, fungsi dan tujuan dari perwalian sendiri. "Seharusnya, perwalian itu bisa menjadi perekat bagi hubungan personal antara mahasiswa dengan dosen wali, sehingga segala kesulitan akademik, psikologis maupun kesulitan-kesulitan lainnya dari mahasiswa dapat dibantu pemecahannya oleh dosen wali', tandasnya.

Untuk itu, bagi Prihananto, penghilangan kesan formalitas dan penjauhan makna substansional dari perwalian secepatnya harus dihilangkan, sebab jika kesan formal yang dikedepankan, hubungan personal yang seharusnya familier tidak mungkin tercipta dan kesan kaku yang akan muncul. Kritik Prihananto juga tertuju pada sistem penunjukan yang dilakukan dalam penentuan perwalian. " Saya bukannya tidak setuju dengan penunjukan itu, tapi lepasnya tanggung jawab dosen setelah sekedar di SK untuk perwalian ini yang seharusnya dihapuskan," komentarnya. Pendapat ini tentunya, lebih tertuju pada para dosen yang sering kali lalai dengan tanggung jawab sebagai dosen wali. Kritik ini juga berangkat dari seringnya kasus pelepasan tanggung jawab dosen terhadap perwalian.

## **B. Pandangan Mahasiswa tentang Perwalian**

Untuk mengetahui peran dan fungsi dosen wali studi dari perspektif mahasiswa, penelitian juga menjangkang data dari beberapa mahasiswa. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Mengenai intensitas kunjungan mahasiswa ke wali studinya dalam rangka konsultasi didapat data sebagai berikut: sebagian besar mahasiswa/i datang ke dosen wali studinya hanya sekali dalam satu semester. Mahasiswa yang mengunjungi dosen wali studinya dua kali / tiga kali dalam semester sangat amat jarang. Bahkan ditemukan juga bahwa ada mahasiswa yang tidak pernah mengunjungi dosen wali studinya. Alasan kenapa mahasiswa menemui dosen wali studinya satu kali dalam satu semester, di antaranya sulitnya menemui dosen wali studi. Alasan seperti yang dikemukakan mahasiswa sudah sangat umum, dalam arti hampir semua mahasiswa menyatakan hal tersebut. Meskipun harus juga dicermati, betulkah karena faktor kesulitan menemui dosen wali studinya.

Bisa jadi jawabannya benar, karena meskipun sudah dijadwalkan sedemikian rupa oleh fakultas tetapi masih ditemukan beberapa dosen yang tidak datang. Meskipun demikian, tidak seratus persen alasan yang dikemukakan mahasiswa benar sebab ada juga realitasnya mahasiswa yang tidak datang [tidak mau] menemui dosen wali studinya.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa datang ke wali studinya hanya untuk meminta tanda tangan di buku KRS/KHS mahasiswa. Amat sedikit yang menyatakan bahwa mereka datang dalam rangka melaporkan hasil/capaian prestasi dan atau untuk keperluan lainnya misalnya kesulitan dalam pembelajaran dan sebagainya.

Salah tugas dosen wali studi, sebagaimana termaktub dalam buku panduan, adalah memberikan informasi tentang sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik berikut pemanfaatannya. Data lapangan menunjukkan bahwa hampir semua dosen wali studi tidak pernah menginformasikan perihal sarana prasarana penunjang akademik dan non akademik. Kalaupun ada sangat amat kecil persentasenya, dan itupun sebagian besar bukan inisiatif dari dosen wali studi tetapi sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Kalaupun ada informasi yang diberikan dosen, berkisar pada masalah prosedur beasiswa, keberhasilan studi, sistem akademik dan sarana prasarana yang perlu dilakukan pembenahan, prosedur birokrat, dan nilai.

Mengenai tugas dosen wali dalam hal membantu mahasiswa menyesuaikan diri, bertindak dan berpikir sesuai dengan kehidupan kampus, diperoleh data bahwa sebagian besar menyatakan tidak pernah. Meskipun demikian masih ada dosen yang melakukan tugasnya tersebut, misalnya dengan memberikan informasi tentang cara mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studi.

Adapun problematika umum yang ditemui oleh mahasiswa cukup beraneka ragam. Di antaranya dikemukakan bahwa “dosen tidak tanggap, hanya mau memberi saran kalau ditanya itupun dengan agak sulit, dosen terkesan mempersulit diri dengan sering ingkar janji tanpa ada rasa penyesalan.” Demikian juga yang disampaikan oleh si B: “sulitnya bertemu dosen wali studi.” Sedang mahasiswa lain menyatakan bahwa dosen wali studi kurang akrab sama mahasiswa bimbingannya, kurang mau mengerti keluh kesah mahasiswa intinya kurang ngayomi mahasiswa.” Sedang mahasiswa yang lain menyatakan: “selama ini saya di Fakultas Dakwah tidak pernah mengalami sistem perwalian” Bahkan ada yang menyatakan bahwa perwalian tidak lebih dari formalitas belaka karena hanya tanda

tangan. Terjadinya proses perwalian sedemikian rupa mendapatkan kritikan yang ditujukan kepada dekanat bahwa mereka “kurang memberikan perhatian dan memberikan tindakan yang tegas tentang perwalian. Sedangkan saran yang diberikan dalam rangka memperbaiki tugas dan fungsi dosen wali studi dalam pandangan mahasiswa di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Dosen itu tidak hanya menunggu bola tetapi menjemput bola, jangan mempersulit dengan alasan sibuk karena itu konsekwensi dosen dengan menerima bayaran
- Wali studi harus bisa menyempatkan / meluangkan waktu untuk mahasiswa
- Harusnya lebih mengayomi, mengerti dan mengasihi mahasiswa
- Sangat penting karena kita bisa berkonsultasi langsung tanpa maludan sungkan karena fungsi wali studi sebagai orang tua pengganti
- Tolong wali studi yang akan datang dijalankan dengan baik: memberikan sarana tentang apa dan apa yang dibutuhkan selama jadi mahasiswa IAIN, memberi dorongan yang baik agar mahasiswa bisa kreatif dalam hal apa dan apa yang dilakukan, untuk konsultasi.
- Kalau hanya ngambil gaji dan tandatangan tok lebih baik engga' usah ada wali studi ke depan tidak jelas
- Dosen wali studi seharusnya dapat membantu anak bimbingannya

### C. Analisis

Dari data di atas, sebenarnya kunci pokok persoalan perwalian adalah belum *established* nya sistem perwalian yang ada di IAIN Sunan Ampel. Buku panduan yang salah satu isinya tentang perwalian masih sangat global dan menurut pandangan penulis butuh penjelasan yang lebih rinci dan dilengkapi perangkat-perangkatnya. Di samping itu, selama ini pihak rektorat dan dekanat memandang bahwa dosen sudah cukup diberi buku panduan tanpa adanya pelatihan atau apapun namanya yang mana sebuah forum untuk membekali dosen dengan fnungsi dan tugasnya sebagai dosen wali. Asumsi bahwa dosen yang diangkat menjadi dosen wali studi sudah tahu tugasnya harus dibuang jauh-jauh sehingga tugas yang akan dilaksanakan oleh dosen wali studi tidak sebagaimana sekarang ini, yaitu hanya tanda tangan saja.

Di samping itu perlu juga diperhatikan sistem pemrograman mata kuliah yang dilakukan di IAIN Sunan Ampel. Memang betul adanya bahwa

sistem SKS yang seharusnya dilaksanakan dan akan memungkinkannya proses perwalian yang benar, sementara ini, harus digantikan dengan sistem paket, sehingga dosen wali studi dan mahasiswa “dipaksa” untuk mengiyakan kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan jumlah SKS yang diambil tanpa memperhatikan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

Setiap semester mahasiswa diwajibkan mengambil program beberapa mata kuliah, utamanya yang diminati oleh mahasiswa tersebut. Mata kuliah-mata kuliah tersebut mempunyai bobot kredit, yang disebut dengan SKS (satuan kredit semester). Bobot kredit ini kemudian dijumlahkan, dan setiap mahasiswa tidak boleh memprogram melebihi jumlah 24 SKS.

Jumlah SKS yang diperkenankan untuk diprogram oleh seseorang mahasiswa bergantung pada nilai rata-rata/IP (Indeks Prestasi) yang dicapai pada semester sebelumnya; kecuali mahasiswa yang baru masuk di semester I. Bila seseorang mahasiswa dapat menyelesaikan ujian akhir semesternya dengan predikat baik, maka ia diperkenankan untuk memprogram mata kuliah pada semester berikutnya dengan jumlah yang lebih besar daripada semester yang telah dijalannya, atau pada batas maksimal yang diperkenankan. Demikian sebaliknya, bila prestasi semester yang dijalannya mendapat nilai kurang baik, maka ia tidak boleh menambah SKS pada semester berikutnya. Maksimal sama dengan jumlah SKS semester yang dijalannya, bahkan boleh jadi dikurangi dari jumlah SKS dari semester yang telah dijalannya.

Dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, beban studi mahasiswa yang memiliki IP yang sama, tidak selalu sama dengan jumlah SKS yang dapat diprogram pada semester berikutnya, karena perbedaan hasil studi semester sebelumnya. Dengan demikian, proses perwalilan akan bisa berlangsung secara baik dan benar apabila:

- Sistem perwalian harus dibuat sedemikian rupa termasuk buku panduan dan segala perangkatnya sehingga dosen mengerti secara jelas tugas dan fungsinya sebagai dosen wali studi, dan dipandang perlu dosen diikutkan pelatihan, khususnya berkaitan tugas yang akan dilaksanakan.
- Sistem paket yang selama ini diterapkan semestinya harus digantikan dengan SKS murni, sehingga dosen akan tampak perannya, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan SKS

- Mahasiswa perlu juga perlu diberi penjelasan yang cukup mengenai perwalian, sehingga mereka juga tidak merasa malu untuk berkonsultasi kepada dosen wali studinya.

### III

#### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapatlah kiranya ditarik kesimpulan:

Proses perwalian yang berlangsung di IAIN Sunan Ampel sejujurnya masih sangat jauh dari harapan dan ukuran ideal. Kondisi ini terjadi disebabkan permasalahannya sangat kompleks. Stagnannya perwalian yang terjadi di IAIN Sunan Ampel tidak dapat dibebankan kesalahannya pada satu pihak saja, tapi semua pihak harus jujur mengakui kesalahan ini. Artinya, harus ada kesadaran dari semua pihak untuk membuka diri, mengakui akan kurang optimalnya peran dan fungsi mereka (baik dosen maupun mahasiswa) dalam menjalankan peran-peran akademik. Selain itu, kurang baiknya proses perwalian di IAIN Sunan Ampel bukan hanya saja dikarenakan personalia (penggerak sistem) yang kurang optimal menjalankan fungsi dan perannya, namun juga dikarenakan sistem yang dipergunakan juga kurang mendukung program perwalian ini. Sehingga, perwalian yang seharusnya dijadikan sebagai jempatan interaksi yang harmonis dan berkesinambungan antara mahasiswa dan dosen, tidak dapat terealisasikan.

Tugas dan fungsi dosen wali studi yang sementara ini hanya sekedar penandatanganan KRS dan KHS mahasiswa sudah sepatutnya dikembalikan sebagaimana yang termaktub dalam buku panduan dengan adanya penambahan perangkat-perangkatnya sehingga apa yang dilaksanakan selama proses perwalian akan terekam dan ini dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dosen wali di masa yang akan datang. ➤